

SKRIPSI
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)
DI KECAMATAN BIRINGKANAYA
KOTA MAKASSAR

WINNIE THALIA

E211 16 007



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
202



Optimized using
trial version
www.balesio.com



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : WINNIE THALIA
NIM : E211 16 007
Program studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim Penguji Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 19 Agustus 2020

Pembimbing I

Prof. Dr. Rakhmat, MS.
NIP 19630520 198702 1002

Pembimbing II

Adnan Nasution, S.Sos, M.Si.
NIP 19740707 200501 1001

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : WINNIE THALIA
NIM : E211 16 007
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA
MAKASSAR

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim Penguji Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Rakhmat, MS (.....)
Sekertaris Sidang : Adnan Nasution, S.Sos, M.Si (.....)
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Sulaiman Asang, MS (.....)
2. Dr. Badu Ahmad, M.Si (.....)





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WINNIE THALIA

N I M : E211 16 007

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 22 September 2020



WINNIE THALIA

E211 16 007



Kata Pengantar

Syalom

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini bisa selesai semata-mata bukan karena kuat dan perjuangan penulis, melainkan karena pertolongan dan penyertaan Tuhan saja. Saat penulis meminta yang baik, Tuhan selalu memberikan yang terbaik.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan baik secara teknis maupun non teknis. Berbagai kesulitan dan kerumitan terjadi dalam proses penulisan skripsi ini namun karena adanya dukungan, doa, serta bantuan dari orang-orang terdekat memungkinkan penulis untuk lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini, karena penulis percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua terkasih Ayahanda tercinta Yohanes Ari dan Ibunda Tercinta Yuti Karti, tidak ada lagi kata yang mampu menuliskan betapa besar rasa terima kasih penulis untuk kalian. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, doa, dukungan, bahkan jerih lelah serta tentunya didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang membalasnya berlipat kali ganda serta dikaruniakan selalu berkat, panjang umur, rahmat, dan kesehatan dari pada-Nya.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh



u, melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan
asih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang
nberikan bantuan, teruntuk kepada :

1. Dr. Nurdin Nara, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Tang Abdullah, M.Sos.,MAP selaku Sekertaris Departemen Ilmu Administrasi Fisip Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Rakhmat, MS, selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus dosen Pembimbing I penulis, yang selalu memberi motivasi, arahan dan dukungan dalam proses akademik dan penulisan skripsi ini.
3. Adnan Nasution, S.Sos, M.Si, selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta motivasi selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Sulaiman Asang, MS dan Dr. Badu Ahmad, M.Si, selaku dosen sekaligus tim penguji pada ujian proposal dan skripsi yang telah memberi masukan serta saran dalam perbaikan skripsi penulis.
5. Para Dosen dan Staff Akademik Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan.
6. Terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, dan TKSK Biringkanaya yang sudah memebrikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan terimakasih atas bantuan selama penelitian yang diberikan kepada penulis.
7. Terima kasih untuk kakak tersayang Robert Setiawan atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan. Sehat, sukses, dan semangat mengerjakan skripsinya juga. Tuhan Yesus Memberkati.
8. Seluruh keluarga besar penulis di mana pun kalian berada, terimakasih atas dukungan doa dan motivasi yang diberikan selama ini. Tuhan Yesus memberkati.
9. Terima Kasih buat Keluarga Besar PMKO FISIP UNHAS tanpa terkecuali, atas rasa kepedulian dan kekeluargaan yang sangat erat yang dibangun selama ini, teruslah menjadi garam dan terang di manapun kalian berada, Tuhan Yesus Memberkati.
10. Untuk Pengurus PMKO FISIP UNHAS Periode 2018/2019 “Baku Sayang” terima kasih atas segala pelayanan, kesabaran dan kekompakan selama proses kepengurusan. Tetaplah jadi berkat dan



pelayan bagi Tuhan, tetap menyebarkan kasih di manapun kalian berada, Tuhan Yesus Memberkati.

11. Keluarga Besar HUMANIS FISIP UNHAS. Kanda-kanda RELASI 2012, RECORD 2013, UNION 2014, CHAMPION 2015, adik-adik LEADER 2017, LENTERA 2018 dan MIRACLE 2019, yang sudah memberikan pengalaman berharga selama berorganisasi di kampus, semoga sukses selalu.
12. Terima kasih Departemen Komunikasi dan Informasi (DKI) Periode 2018/2019 atas pengalaman dan kerjasamanya dalam kepengurusan, semoga sukses selalu.
13. Teruntuk saudara-saudariku, Friendship Generation Of Administration Departemen 2016 (FRAME 16) yang penulis cintai dan banggakan selalu, terima kasih telah memberi warna dalam dunia kampus, bersama kalian penulis merasakan keluarga baru dengan segala cerita yang penuh dengan suka maupun duka, canda tawa, kebersamaan. Jadilah Frame sejati, sukses selalu dan semoga kalian wisuda tepat pada waktunya.
14. Saudari – saudariku terkasih Sunshine (Mega, Ivon, Jane, Jenika, Merlin, Melan, Yudita, Liza, Nadya) terima kasih atas kebersamaan selama ini, yang telah membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik. Segala kesedihan dan kebahagiaan yang di rasakan selama kuliah. Tetaplah menjadi terang yang nyata dan penyebar kasih dimanapun nanti kalian berada. Tuhan Yesus memberkati
15. Sahabat – sahabatku tercinta Bqueen (Dita, Risna, Ayu, Wiwi, Shiva, Fifi, Nadya, Fania, Amel) terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita susah, senang dalam menjalani pendidikan di kampus dan kegabutan diluar kampus.
16. Terima kasih Matsell Prianugrah M, selalu menjadi sahabat yang memberikan doa, motivasi, dan ide dalam proses penulisan skripsi ini. Sukses selalu, tetap menjadi pribadi yang baik, Tuhan Yesus memberkati.
7. Teman-teman KKN Gelombang 102, Desa Congko, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, atas segala pembelajaran dan kebersamaan yang pernah dilalui. Semoga sukses selalu dan sarjana



tepat pada waktunya. Congko Squad (Kak Habel, Uni, Indah, Fira, Mila, Imam, Sabnur, James).

Serta semua pribadi, kelompok dan pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik dalam proses akademik dan perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, dorongan, dukungan, motivasi, atau apapun itu dan dalam bentuk apapun itu, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan Yang Maha Esa yang melihat dan berkenan membalasnya berlipat kali ganda.

Penulis menyadari banyak kesalahan serta kekurangan dalam penulisan karya tulis ini, karena itu dengan senang hati penulis menerima saran atau pun kritik yang membangun guna menyempurnakan segala kesalahan yang ada.

Makassar, 22 September 2020

Penulis



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xii
ABSTRACK	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I Pendahuluan	1
I,1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah.....	7
I.3 Tujuan Penelitian	7
I.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II Tinjauan Pustaka	9
II.1 Konsep Kebijakan Publik	9
II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	9
II.1.2 Karakteristik Kebijakan Publik	10
II.2 Konsep Efektivitas	11
II.2.1 Pengertian Efektivitas	11
II.2.2 Ukuran Efektivitas	13
II.2.3 Model Proses Efektivitas.....	16
II.2.4 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	18
II ² Konsep Program.....	19
Konsep Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	22
II.4.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	23
II.4.2 Dasar Hukum.....	24



II.4.3 Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	24
II.4.4 Prinsip Umum	25
II.4.5 Besaran Manfaat.....	26
II.4.6 Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	26
II.4.7 Kartu Kombo.....	26
II.4.8 Mekanisme Pelaksanaan Program BPNT	27
II.5 Kerangka Pikir	32
BAB III Metode Penelitian.....	33
III.1 Pendekatan Penelitian	33
III.2 Tipe Penelitian	33
III.3 Lokasi Penelitian.....	33
III.4 Fokus Penelitian	34
III.5 Unit Analisis	35
III.6 Sumber Data	35
III.7 Narasumber atau Informan	35
III.8 Teknik Pengumpulan Data.....	36
III.9 Teknik Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
IV.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
IV.1.1 Profil Dinas Sosial Kota Makassar	40
IV.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan.....	41
IV.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Kerja	42
IV.2 Profil Kecamatan Biringkanaya.....	51
IV.2.1 Profil Kecamatan Biringkanaya.....	51
IV.2.2 Visi dan Misi Kecamatan Biringkanaya	52
IV.2.3 Kependudukan Kecamatan Biringkanaya	53
IV.2.4 Kondisi Aparatur Pemerintahan Kecamatan	54
IV.2.5 Struktur Organisasi.....	57
ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
Pemahaman Program	59



V.2 Tepat Sasaran.....	61
V.3 Tepat Waktu	64
V.4 Tercapainya Tujuan.....	66
V.5 Perubahan Nyata	70
V.6 Faktor Pendukung dan faktor Penghambat	74
BAB VI PENUTUP	76
VI.1 Kesimpulan	76
VI.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Biringkanaya	52
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya	57
Gambar 5.1 Basis Data Terpadu	62
Gambar 5.2 Jumlah Penerima BPNT Kecamatan Biringkanaya	68



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk Berdasarkan Kepadatan Penduduk	54
Tabel 4.2 Komposisi Karyawan Kecamatan Biringkanaya	55
Tabel 5.1 Rekap Bantuan Sosial Januari 2020	69
Tabel 5.2 Hasil Penelitian Program BPNT di Kecamatan Biringkanaya	71





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Winnie Thalia (E211 16 007), Effectivity Of Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in sub-district Biringkanaya, Makassar City Supervised by Prof. Dr. Rakhmat, MS and Adnan Nasution, S.Sos, M.Si

This research intend to find out the effectivity of Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in sub-district Biringkanaya, Makassar City. This research using Sutrisno theory in (Lestari & Murti, 2015). Methods that been used in this research is qualitative research method and as for the data collection technique in this research are using interview, observe, and documentation method.

Result of this research showing that the success of Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in sub-district Biringkanaya, Makassar City is quite effective, by seeing: (1) Society comprehension about BPNT program is good enough; (2) The accuracy target of beneficiary of BPNT program is less precise due to the renewal of poor society data is not efficient yet; (3) The time accuracy of disbursement of funds BPNT program to KPM is not good due to the late distribution of assistance; (4) The aim of BPNT program has been implemented well by seeing the lack of expenditure burden and help to fulfill the food needs of Beneficiary Family; (5) The real changed that experienced by the BPNT addressee have felt well regarding to the addressee have felt the benefits of this program.

Keywords: Effectiveness, BPNT Program





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

Winnie Thalia (E211 16 007), Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Dibimbing oleh Prof. Dr. Rakhmat, MS dan Adnan Nasution, S.Sos, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan Teori Sutrisno dalam (Lestari & Murti, 2015). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sudah cukup efektif, melihat: (1) Pemahaman masyarakat mengenai program BPNT dapat dikatakan baik; (2) Ketepatan sasaran penerima bantuan program BPNT masih kurang tepat dikarenakan pembaharuan data masyarakat miskin yang belum efisien; (3) Ketepatan waktu pencairan dana program BPNT kepada KPM masih kurang baik karena sering mengalami keterlambatan penyaluran bantuan; (4) Tujuan dari program BPNT telah terlaksana dengan baik dilihat dari kurangnya beban pengeluaran dan membantu memenuhi kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (5) Perubahan nyata yang dialami oleh penerima BPNT telah dirasakan cukup baik karena penerima bantuan telah merasakan manfaat dari adanya program ini.

Kata Kunci : Efektivitas, Program BPNT



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia merupakan suatu masalah yang sangat mendasar. Pangan merupakan kebutuhan utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat sehingga menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional, oleh karena itu manusia tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan pangan. Berdasarkan (Undang-Undang RI, 1996) pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Pemenuhan pangan serta produksi pangan yang berkualitas bagi masyarakat diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang merupakan hak bagi setiap orang.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi negara *super power* dengan memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang melimpah. Namun, hal tersebut tidak didukung dengan skill yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengelola sendiri sumber daya alam mereka. Sehingga sampai saat ini sebagian sumber daya alam yang potensial dikelola oleh negara asing. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia yang kaya dengan segala potensi tetapi masih menjadi negara yang miskin di dunia. Seharusnya, Indonesia saat ini mampu membuat masyarakatnya menjadi dan tidak ada lagi pengangguran, kemiskinan, dan kelaparan apabila



masyarakat dan pemerintah Indonesia mampu bekerja sama dalam mengelola sumber daya dengan baik.

Pada kenyataannya tidak semua masyarakat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri karena disebabkan oleh kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh negara-negara di dunia khususnya Indonesia. Sehingga membuat kemiskinan menjadi masalah sosial yang selalu relevan untuk dikaji hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang hadir di tengah-tengah kita dan bahkan gejala kemiskinan meningkat sejalan dengan krisis yang masih di hadapi oleh bangsa Indonesia.

Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, negara bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dalam (Undang-Undang, 2011) tentang penanganan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meminimalisir kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan dan peraturan yang mengacu pada pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Program-program penanggulangan kemiskinan didukung oleh pemerintah dengan menerbitkan (Peraturan Presiden RI, 2010) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam menanggulangi kemiskinan dan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok, pemerintah telah menerapkan kebijakan program sosial berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program diterapkan untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan



masyarakat serta memberi nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan (Peraturan Presiden RI, 2017) tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai.

Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) mulai dilaksanakan pada awal tahun 2017 dengan melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi oleh Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial di beberapa daerah terpilih dan telah membagikan ke 44 kota di Indonesia. Terkhusus di Kota Makassar penerima BPNT sebanyak 39.795 KPM.

Program BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah dalam bentuk non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerja sama dengan bank penyalur BPNT atau biasa disebut E-Warong (elektronik warong). Bantuan tersebut tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur sesuai dengan kebutuhan di E-Warong. BPNT diberikan kepada warga miskin di Indonesia yang sudah terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapatkan bantuan sebesar RP 110.000, yang di transfer setiap bulan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik yang memiliki sistem saving account dan e-Wallet/ dompet elektronik, sehingga keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membelanjakan dana bantuan sosial tersebut untuk membeli bahan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih atau tidak digunakan, maka dana tersebut akan secara otomatis di tabungkan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.



BPNT dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran bantuan sosial, serta mendorong keuangan inklusi.

Kota Makassar yang merupakan Ibu Kota Sulawesi Selatan termasuk dalam penerima BPNT, berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Sosial jumlah penerima BPNT khususnya di Kecamatan Biringkanaya pada tahun 2018 mencapai 2.782 KPM, dan pada tahun 2019 mencapai 2.689 KPM. Jika dilihat, terdapat penurunan jumlah penerima manfaat di Kecamatan Biringkanaya. Perubahan tersebut setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kesalahan data penerima, perpindahan domisili ke wilayah lain namun masih tercatat di lokasi tempat tinggal awal, penduduk yang telah meninggal dunia tetapi masih tercatat sebagai penerima program BPNT, serta status keluarga yang mengalami peningkatan atau penurunan menjadi sejahtera.

Setelah kurang lebih tiga tahun berjalannya program BPNT, kenyataannya program ini masih terdapat kurang optimal dengan perencanaan awal di Kecamatan Biringkanaya. Kurangnya kuota Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga menyebabkan beberapa masyarakat miskin belum menerima program tersebut dan menimbulkan reaksi kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena beberapa warga yang semestinya masuk ke dalam komponen penerima manfaat namun tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan non tunai. Permasalahan ini menjadi alasan mengapa bantuan pangan non tunai masih belum tepat sasaran. Ketidak tepatan waktu penyaluran BPNT juga masih sering menjadi masalah yang membuat Keluarga Penerima Manfaat

urus berkorban untuk menutupi pengeluaran konsumsi rumah tangganya



Hasil penelitian (Junaidi, 2018) yang berjudul “Perbandingan Kepuasan Penerima BPNT dan Penerima RASTRA di Kabupaten Cakung, Jakarta Timur”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (RASTRA), juga untuk menganalisis apakah tingkat kepuasan penerima BPNT lebih tinggi dari tingkat kepuasan penerima RASTRA. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan penerima BPNT adalah 74,3%, sedangkan tingkat kepuasan penerima RASTRA adalah 62,9%. Pemerintah harus mengevaluasi dan meningkatkan jumlah pasokan makanan dan e-Warong dalam Program BPNT untuk meningkatkan tingkat kepuasan penerima program. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidaknyamanan dan mengurangi resiko penerima BPNT yang tidak menerima pasokan makanan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dini, 2019) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Belitung Utara Kota Bandar Lampung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas program BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Gulak Galik dengan seringnya melakukan pembaharuan data penerima manfaat program serta pemberian pelayanan dan penginformasian program lebih maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan, 2019) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kelurahan Glugur Kota Medan Barat”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui s pelaksanaan Program BPNT terhadap kesejahteraan keluarga miskin.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Program BPNT Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini didasari dengan adanya pendataan dan survey yang merupakan bagian dari strategi program sehingga bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat waktu, sehingga masyarakat mendapatkan bantuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga miskin dalam aspek tingkat pendapatan dan ketahanan pangan.

Adanya program pemerintah tersebut ditujukan sebagai upaya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat mewujudkan keluarga sejahtera. Efektivitas pelaksanaan program BPNT tidak bisa dilihat secara parsial hanya berdasarkan pada kinerja instansi tertentu saja. hal tersebut dapat dilihat berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno dalam (Lestari & Murti, 2015) yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pelaksanaan program yang efektif dapat dilihat dari penerapan selama ini yang sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Makassar, terutama berkaitan dengan pelaksanaan program BPNT karena dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, yaitu dilihat dari bagaimana masyarakat dapat memahami kegiatan program itu, apakah suatu program tepat sasaran bagi masyarakat, waktu dan pelaksanaan program yang telah diatur serta pencapaian tujuan yang berorientasi pada perubahan yang nyata bagi masyarakat.



Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan masih terdapat masalah terkait pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota

Makassar. mengingat pentingnya program ini dalam upaya memberantas kemiskinan sehingga perlu upaya pelaksanaan yang efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam dalam wujud penelitian dengan judul

“Efektifitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar”

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?
2. Faktor-faktor penghambat & pendukung efektivitas Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat & pendukung efektivitas Program Bantuan pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar



I.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai landasan teoritis dan memberikan wawasan yang luas bagi civitas akademika khususnya tentang efektivitas suatu pelaksanaan program yang berorientasi pada pemerintah dibidang kebijakan publik.

2. Secara praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan masukan dari berbagai pihak khususnya kepada penyelenggara program bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kota Makassar. sehingga dapat dijadikan referensi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan seperti yang diharapkan oleh masyarakat untuk menekan angka kemiskinan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kebijakan Publik

II.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya, kebijakan publik menitikberatkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun, didefinisikan, serta bagaimana bagaimana persoalan tersebut masuk ke agenda kebijakan.

Menurut Dye dalam (Subarsono, 2005) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sedangkan James E. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah

Menurut James E. Anderson dalam (Suwitri, 2008) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan



masalah tertentu. Dengan demikian, menurut Anderson, tugas utama dari pemerintah adalah membina dan mengatur kedua jenis lingkungan agar tetap harmonis dan mengarahkannya menuju pada pencapaian

yang ingin dicapai. dengan demikian pemerintah harus berupaya mempertimbangkan berbagai hambatan dan peluang dalam rangka pencapaian tujuan.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan publik merupakan suatu konsep tersistematis yang menjadi acuan pelaku kebijakan untuk mencapai suatu tujuan.

II.1.2 Karakteristik kebijakan publik

Menurut (Wahab, 2004) menjelaskan ciri-ciri kebijakan publik meliputi :

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan;
- b) Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri;
- c) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu;
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif mungkin pula negat.

Sedangkan, menurut (Agustino, 2008) kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak;
- b) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah;



- c) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur bidang-bidang tertentu, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan;
- d) kebijakan publik bersifat positif maupun negative;
- e) kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik melihat sinkronisasi yang ideal dan baik antara kebijakan publik, pelaku kebijakan, serta lingkungan dimana kebijakan itu diterapkan. dengan demikian, proses pencapaian tujuan secara bertahap yang telah di susun di dalam suatu kebijakan publik dapat dijalankan dengan baik.

II.2 Konsep Efektivitas

II.2.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris “effective” artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran kegiatan atau program yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Dapat dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tersebut telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini didukung oleh pendapat menurut (Sumaryadi, 2005), mengatakan bahwa efektivitas dalam organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai.



enurut James L.Gibson dkk dalam (Tiara Rohana, 2019), mengatakan “efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan sasaran efektivitas”

selanjutnya Tjokroamidjojo mengatakan bahwa, “efektivitas agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil”.

Menurut H. Emerson dalam (Iqbal, 2018) yang menyatakan bahwa: *“Effectiveness is a measuring in tern of attaining prescribed goal or objectives* (efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya)”. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Tingkat efktivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan pelaksanaan maupun hasil dari program.

Sedangkan menurut Georgopolous dan Tannembraum dalam (Steers, 1985) mengemukakan bahwa, “efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan – tujuan organisasi.

Menurut Salim dalam (Dini, 2019) “Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional”.



Menurut Hadayaningrat dalam (Lestari & Murti, 2015) mengemukakan bahwa efektifitas merupakan suatu pengukuran dimana target telah tercapai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Menurut (Steers, 1985) “Efektivitas adalah sejauh mana organisasi melakukan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya, efektifitas paling mudah dipakai bila dipandang dari sudut pencapaian tujuan optimum yakni efektifitas organisasi dapat dipandang sebagai batas kemampuan organisasi mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan operasi dan operasionalnya”

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa efektifitas merupakan sebuah ukuran untuk melihat tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Dapat dikatakan efektif apabila seluruh komponen yang menjadi tujuan organisasi atau sebuah program telah terpenuhi. Mengukur efektifitas program ditentukan oleh tepat atau tidaknya sasaran yang ingin dicapai serta hasil apakah yang diperoleh dengan adanya program tersebut.

II.2.2 Ukuran Efektivitas

Menurut Ducan dalam (Steers, 1985), terdapat 3 indikator yang mempengaruhi efektifitas, yaitu:

1. Pencapaian tujuan : adalah suatu proses yang merupakan bagian puncak dari usaha keseluruhan suatu program. Upaya pencapaian tujuan “ketahui apakah tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator dari pencapaian tujuan ini yaitu: (1) Kurun waktu (2) Sasaran dan (3) Dasar Hukum.



2. Integrasi : Yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu (1) Prosedur dan (2) Proses Sosialisasi.
3. Adaptasi : adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyalurkan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator yaitu : (1) Peningkatan Kemampuan dan (2) Sarana dan Prasarana.

Menurut Gibson, dkk dalam (TOAD, V. S., RARES, J., & POMBENGI, 2018) indikator efektivitas dapat diukur :

- 1) Produksi, yaitu keberhasilan melaksanakan dan menghasilkan jumlah dan mutu kerja (program/kegiatan) yang direncanakan/ditetapkan sebelumnya.
- 2) Efisiensi, yaitu rasio hasil kerja dengan sumber-sumber yang digunakan (biaya, tenaga, waktu).
- 3) Kepuasan, yaitu kemampuan organisasi memenuhi kebutuhan pegawainya, yang nampak pada sikap pegawai, kehadiran/absensi, dan keluhan.
- 4) Adaptasi/fleksibilitas, yaitu kemampuan organisasi menanggapi perubahan dan perkembangan tugas.
- 5) Perkembangan, yaitu perkembangan atau kemajuan kemampuan organisasi mencapai target hasil yang ditetapkan.



Menurut (Budiani, 2005) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variable-variabel sebagai berikut

- 1) Ketetapan sasaran program : sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 2) Sosialisasi Program : kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
- 3) Tujuan Program ; sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Pemantauan Program : kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Untuk mengukur efektivitas menurut Sutrisno dalam (Lestari & Murti, 2015) mendefinisikan hasil studi para ahli mengenai ukuran efektivitas program didalam sebuah organisasi, yaitu:

- 1) Pemahaman Program : dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program.
- 2) Tepat sasaran : dilihat dari apa yang dikehendaki tercapai atau menjadi kenyataan
- 3) Tepat Waktu : dilihat melalui penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.



tercapainya tujuan ; diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan.

- 5) Perubahan nyata : diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata masyarakat setempat.

II.2.3 Model Proses Efektivitas

Model ini menekankan proses-proses pokok yang berhubungan dengan efektivitas, dan tidak memandang efektivitas sebagai keadaan akhir. Dengan demikian model ini mengakui bahwa baik organisasi maupun lingkungannya terus berubah. Menurut (Steers, 1985) terdapat tiga dimensi utama model ini, sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Tujuan

Nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasilnya dengan tujuan organisasi. Optimalisasi tujuan mengakui kenyataan bahwa sebagian besar organisasi tidak dapat “memaksimalkan” tujuan tertentu sekalipun mereka menghendakinya. Sebaliknya, berdasarkan pengakuan akan adanya faktor-faktor pembatas terhadap tingkah laku dan prestasi organisasi, para manajer yang efektif dianggap menentukan dan mengejar tujuan yang optimal (yaitu, tujuan yang diinginkan yang telah dibatasi atau dimodifikasi oleh sumber daya yang tersedia). Jadi, optimalisasi adalah sarana pengimbang berbagai tujuan yang bertentangan, sehingga setiap tujuan menerima cukup perhatian dan sumber daya selaras dengan tingkat kepentingannya bagi organisasi. Di kemukakan di sini bahwa efektifitas harus dinilai terhadap tujuan yang bisa dilaksanakan, dan bukan terhadap konsep tujuan yang maksimum.



2. Perspektif Sistem

Penggunaan perspektif menekankan pentingnya arti interaksi organisasi lingkungan. Perspektif sistem ini memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen baik yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi sementara komponen-komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi. Jika hubungan ini dikenal dengan jelas, akan lebih mudah bagi manajer mengambil tindakan tegas untuk memperlancar pencapaian tujuan berkat bertambahnya pengertian mereka mengenai dinamika organisasi.

3. Tekanan pada Perilaku

Aspek terakhir adalah tekanan pada pengertian mengenai peranan perilaku manusia dengan pengaruhnya pada prestasi organisasi. Dengan kata lain, jika para anggota organisasi menyetujui sasaran pemimpin mereka, maka dapat diperkirakan bahwa tingkat usaha yang mereka tujukan untuk mencapai sasaran-sasaran akan tinggi. Di pihak lain, jika sasaran organisasi sebagian besar tidak cocok dengan kebutuhan dan tujuan pekerja, sulit untuk percaya bahwa mereka akan memaksimalkan kontribusi mereka. Jadi, bila kita membahas efektivitas organisasi yang tidak kalah pentingnya untuk dibahas adalah hubungan antara apa yang diinginkan para pekerja dengan apa yang diinginkan organisasi.



II.2.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Menurut (Steers, 1985) mengidentifikasi empat variable yang berhubungan dengan efektivitas, sebagai berikut:

1. Karakteristik Organisasi

Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas. Mengenai struktur, ditemukan bahwa meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi. Walaupun produktivitas dan efisiensi cenderung mempunyai hubungan yang positif dengan beberapa variable struktur ini tetapi sikap kerja (khususnya kepuasan kerja dan keikatan) cenderung mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan produktivitas dan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa para manajer bertanggung jawab mengidentifikasi dengan jelas tujuan pokok mereka dan mengendalikan perilaku individu tersebut.

2. Karakteristik Lingkungan

Lingkungan dalam dan lingkungan luar organisasi juga berpengaruh atas eektivitas. Lingkungan luar meliputi hukum, ekonomi, dan pasar dimana organisasi berusaha mendapatkan sumber daya dan mendistribusikan keluarannya. Lingkungan dalam meliputi kebudayaan dan sosial yang sangat menentukan perilaku pekerja.

3. Karakteristik Pekerja



aktor pengaruh yang ketiga atas efektivitas adalah para pekerja itu
Pada kenyataannya, para anggota organisasi merupakan faktor

pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau merintangi tercapainya tujuan organisasi. Kesadaran akan perbedaan sikap pribadi di antara para pekerja sangat penting bagi para manajer untuk memberikan tanggapan dengan cara yang berbeda atas usaha untuk mencapai tujuan.

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen

Telah diidentifikasi beberapa mekanisme khusus para manajer meningkatkan efektivitas organisasi. Mekanisme ini meliputi penetapan tujuanstrategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan adaptasi dan inovasi organisasi.

II.3 Konsep Program

Program merupakan salah satu unsur penting dalam merencanakan suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih mudah dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yakni :

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan.

Menurut Terry dalam (Mulyadi, 2015) menyatakan mengenai program sebagai berikut :



A program can be defined as a comprehensive plan that includes future different resources in an integrated pattern and establish a sequence of action and time schedules for each in order to achieve stated objectives. e up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, s and budgets". (Program merupakan rencana yang bersifat

komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standar dan anggaran).

Kayatomo dalam (Djabbar Ramlawati, 2013) menyatakan bahwa program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan.

Menurut Charles O. Jones dalam (Anas, 2017) pengertian program adalah cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga dapat diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas sendiri yang apabila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik

Program yang baik menurut Jones adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas yakni, sebelum menentukan masalah sosial yang akan diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius mengenai bagaimana dan mengapa hal tersebut terjadi dan solusi terbaik apa yang nantinya akan diambil.

Selanjutnya, Grindle dalam (Mulyadi, 2015) menjelaskan bahwa isi program menggambarkan; "kepentingan yang dipengaruhi (*interest affected*), jenis (*type of benefit*), derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change*), status pembuatan keputusan (*site of decision making*), pelaksana



program (program implementers) serta sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)”.

Menurut S.P. Siagian dalam (Mulyadi, 2015) mengemukakan bahwa perumusan program kerja merupakan perincian daripada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dari kegiatan.

Dengan demikian, dapat dilihat program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sasaran yang dikehendaki,
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu,
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta jumlahnya,
4. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam (Pratama & Fauzi, 2018) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.



engukuran dengan ongkos - ongkos yang diperkirakan dan keuntungan
untung yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.

5. Hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya.
6. Berbagai upaya dalam bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai program di atas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program merupakan suatu cara yang dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi.

II.4 Konsep Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial dalam bidang penanggulangan kemiskinan serta mendorong keuangan inklusif, Presiden Republik Indonesia memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Penyaluran bantuan secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan dapat mendukung produktifitas penerima bantuan dan meningkatkan transparansi program serta kemudahan mengontrol dan meminimalisir penyimpangan.

Penyaluran bantuan pangan non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2007 di beberapa daerah terpilih dan telah membagikan ke 44 kota di Indonesia, termasuk di Kota Makassar dengan penerima BPNT mencapai 50 ribu orang. Dengan demikian bantuan pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau kartu keluarga

.(Kemensos.go.id, 2019)



Dengan demikian, Program Bantuan pangan secara tunai dibentuk untuk memperbaiki mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan pangan bagi keluarga miskin dengan lebih mengutamakan pencapaian prinsip 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi) sehingga mampu mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan memberikan manfaat yang nyata dalam peningkatan konsumsi pangan.

Implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) telah diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai yang disusun oleh Kementerian/Lembaga Lintas Sektor terkait, yaitu Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K, dan Kantor Staf Presiden. Pedoman pelaksanaan ini juga digunakan sebagai dasar atau arahan oleh pelaksana program, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank penyalur bantuan, e-warong sebagai agen penyalur bahan pangan. (Kementerian Sosial & dkk, 2017)

II.4.1 Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/ e-warong yang bekerjasama dengan bank. Program BPNT merupakan upaya mereformasi Program Subsidi Renstra yang akan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, serta mendorong keuangan. Penyaluran BPNT dilaksanakan secara bertahap mulai tahun



2017 pada beberapa daerah terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai.

II.4.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan. Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.

II.4.3 Tujuan dan Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan Program Bantuan Pangan Non tunai adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan pangan bagi KPM;



4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
5. Mendorong Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);
4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

II.4.4 Prinsip Umum

Prinsip Umum Program Bantuan Pangan Non tunai adalah sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM;
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa jenis, dan kualitas bahan pangan (beras dan telur) sesuai referensi;
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM;
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.



II.4.5 Besaran Manfaat

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp 110.000,-/ Keluarga Penerima Manfaat / bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur di e-waong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun Elektronik Bantuan Pangan.

Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan tujuan peningkatan nutrisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut akan dievaluasi.

II.4.6 Sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sasaran BPNT adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, dan namanya termasuk di dalam Daftar Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PFM yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.

II.4.7 Kartu Kombo

Instrumen pembayaran yang digunakan sebagai media penyaluran BPNT kepada KPM adalah Kartu Kombo.



1. Kartu Kombo digunakan sebagai identitas KPM dan berfungsi sebagai uang elektronik dan tabungan, sehingga pada saat pengambilan bantuan sosial perlu dibawa oleh KPM.
2. Kartu Kombo menyimpan nilai besaran manfaat bantuan pangan yang diberikan, jika tidak digunakan/dicairkan pada bulan berjalan, dana bantuan tidak akan hilang, dana tersebut akan terakumulasi. Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan tidak dapat dicairkan tunai.
3. Pada Kartu Kombo tertera nama penerima, nomor peserta, nama Bank Penyalur, dan nomor pengaduan.

II.4.8 Mekanisme Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai

1. Tahap Persiapan

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan Bank Penyalur BPNT.

a. Koordinasi di tingkat pemerintah pusat

Koordinasi di tingkat pemerintahan pusat dilakukan antara kementerian/lembaga pelaksana program dengan lembaga terkait. Koordinasi dilakukan oleh Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran Program BPNT, Kemenko PMK selaku Ketua Tim Koordinasi Rastra dan BPNT, Bappenas, kantor Staf Presiden (KSP), TNP2K, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI). Koordinasi dengan kementerian dan lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan program. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan basis hukum,



mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

b. Koordinasi di tingkat Pemerintahan Kota

Pemerintah kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan kelurahan untuk seluruh aspek pelaksanaan program, mulai dari persiapan APBD untuk kegiatan sosialisasi dan pendaftaran peserta hingga penanganan pengaduan masyarakat.

Pemerintah Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal pendaftaran peserta di masing-masing kelurahan serta memastikan keterlibatan petugas kelurahan dalam proses tersebut.

Pemerintah kota memberikan dukungan sarana dan prasarana, sosialisasi, kemudahan perizinan, keringanan biaya, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada e-warong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persiapan E-Warong

Berdasarkan Perpres No.63 tahun 2017, agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh KPM.

2. Tahap Sosialisasi dan Edukasi

- 1) Sosialisasi dan edukasi BPNT dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya KPM mengenai tujuan dan mekanisme pemanfaatan BPNT serta saluran pengaduannya.



- 2) Sosialisasi dan edukasi BPNT juga diberikan kepada E-Warong agar mampu melayani pemanfaatan BPNT E-Warong, sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, dipasang stiker logo khusus sebagai penanda bagi KPM.
- 3) Pelaksana sosialisasi dan edukasi BPNT adalah Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial, aparat daerah, serta Bank Penyalur.
- 4) Instrumen sosialisasi dan edukasi menggunakan berbagai media seperti rapat koordinasi, pedoman umum dan petunjuk teknis, surat edaran dari kementerian/lembaga negara terkait, dan poster/brosur.
- 5) Sasaran edukasi dan sosialisasi BPNT adalah Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial Bansos Pangan, aparat desa, KPM, dan E-Warong.

3. Tahap Registrasi/Distribusi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera)

- 1) Bank Penyalur melakukan registrasi atau pembukuan tentang rekening secara kolektif berdasarkan data KPM yang diberikan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- 2) Bank Penyalur dibantu oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pendamping Sosial melaksanakan distribusi KKS dan Kelengkapannya kepada KPM yang telah dibukakan rekening. Proses ini dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada KPM.
- 3) KPM mendapatkan pemberitahuan terkait kepesertaannya dalam rogram BPNT dan terkait proses registrasi/distribusi KKS.



- 4) pada proses registrasi/distribusi KKS, calon KPM membawa kartu/dokumen identitas diri untuk dilakukan pencocokan dokumen sebelum KKS dibagikan.
- 5) Saat registrasi, Bank Penyalur juga memberikan informasi kepada KPM mengenai lokasi E-Warong yang dapat diakses dan meminta KPM untuk melakukan pengecekan saldo KKS di E-Warong.
- 6) Dalam hal ini ditemukan data KPM yang tidak sesuai (berupa kesalahan penulisan nama, NIK atau alamat) pada saat pelaksanaan registrasi, maka KPM dimaksud harus menyertakan dokumen tambahan berupa surat keterangan dari desa/kelurahan setempat.

4. Tahap Penyaluran BPNT

Transfer manfaat BPNT dari Bank Penyalur ke rekening KPM BPNT dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

5. Tahap Pemanfaatan

- 1) KPM datang ke E-Warong dengan membawa KKS dan Kartu Identitas Diri
 - 2) KPM melakukan cek saldo bantuan yang tersedia pada KKS di mesin EDC dengan memasukkan kode rahasia (PIN) KKS dan akan menerima bukti transaksi pengecekan saldo dana pada KKS.
 - 3) Jika saldo pada KKS mencukupi, KPM dapat melakukan pembelian bahan pangan (sesuai permintaan KPM) dengan memasukkan PIIN KKS ada mesin EDC bank.
- Setelah transaksi berhasil KPM dapat menerima bantuan pangan disertai bukti transaksi.



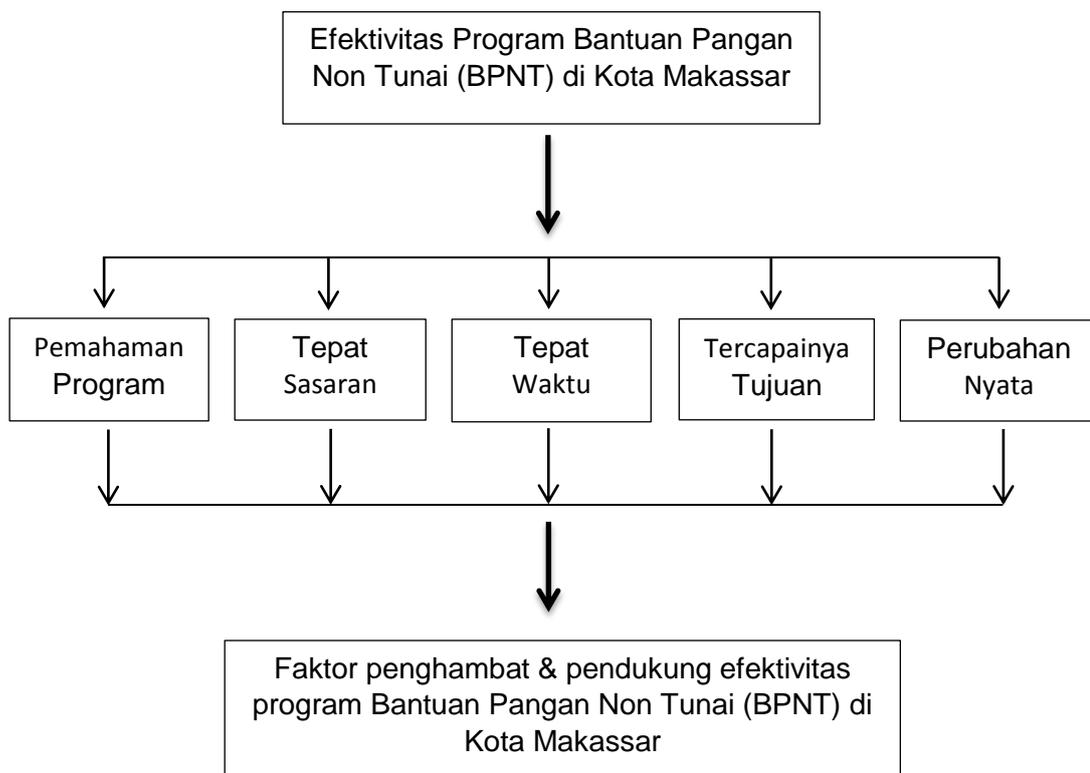
- 5) Saldo yang ada pada KKS KPM akan berkurang sesuai dengan nilai BPNT (pembelian beras dan/atau telur).
- 6) Hal-hal yang perlu diperhatikan :
 - KPM tidak dikenakan biaya dalam melakukan pemanfaatan BPNT.
 - KPM dilarang bertransaksi dengan KKS (menggesekkan KKS pada mesin EDC) tanpa disertai penyerahan bantuan pangan kepada KPM secara langsung.

Dengan demikian dapat disimpulkan, program bantuan pangan non tunai (BPNT) merupakan upaya pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan memberikan manfaat yang nyata dalam pemenuhan pangan setiap bulannya. Program BPNT dibentuk untuk menggantikan program yang sebelumnya yaitu Rastrea yang masih dianggap kurang dalam menerapkan prinsip 6T (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi) sehingga pada tahun 2017 program BPNT mulai diselenggarakan oleh pemerintah. Agar program BPNT berjalan sesuai dengan tujuannya maka peran dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan program dapat terkoordinasi dengan baik, sistem pendataan yang terperinci, dan proses penyaluran berjalan dengan semestinya. Adapun pihak yang terkait dalam melaksanakan program BPNT di Kota Makassar yaitu Dinas Sosial Kota Makassar sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menanggulangi kemiskinan. (Kementerian Sosial & Dkk, 2019)



II.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan dari permasalahan dan dukungan dari tinjauan pustaka maka peneliti membuat kerangka pikir dengan menggunakan teori Sutrisno dalam (Lestari & Murti, 2015). Hal ini dilakukan untuk menjelaskan sejauh mana efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Biringkanaya.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Sehingga memudahkan penulis untuk mendapat data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

III.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan suatu fenomena secara umum tentang masalah yang diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam mengenai efektivitas program bantuan pangan non tunai di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

III.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar dalam hal ini di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar dan Masyarakat penerima bantuan di kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.



III.4 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Biringkanaya, sebagai berikut:

- 1) Pemahaman Program : Dilihat sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui sosialisasi tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
- 2) Tepat sasaran : Program BPNT hanya diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar. KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana. Sumber data KPM adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PFM).
- 3) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi pangan kepada keluarga penerima manfaat sesuai dengan rencana distribusi yaitu setiap awal bulan.
- 4) Tercapainya tujuan ; diukur melalui pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan. melihat dari sejauh mana keberhasilan aparatur dalam mendistribusikan bantuan pangan non tunai. Apakah program yang dilaksanakan bermanfaat bagi yang menerima atau tidak.
- 5) Perubahan nyata : diukur melalui sejauhmana kegiatan tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata kepada masyarakat setempat. Dengan melihat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan pangan non tunai.



III.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Sosial Kota Makassar yang berfokus pada aparat dan penerima manfaat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

III.6 Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung atau observasi maupun hasil wawancara kepada informan berdasarkan pedoman wawancara yang ditujukan untuk aparat Dinas Sosial Kota Makassar dan keluarga penerima manfaat.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui catatan tertulis yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, dokumen-dokumen dan tulisan yang dianggap peneliti berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti

III.7 Narasumber atau Informan

Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah orang yang berwenang dalam memberikan informasi mengenai Efektivitas Bantuan Pangan di Kecamatan Biringkanaya yang terdiri dari :



1. Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
2. Petugas pendamping BPNT kecamatan Biringkanaya
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BPNT di Kecamatan Biringkanaya.

III.8 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer* dan *sumber sekunder*. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder penulis menggunakan pengumpulan data, yaitu :

1. Wawancara

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian.

2. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokas penelitian guna memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal



yang diteliti. Dalam hal ini observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

3. Dokumentasi

Bentuk lain dari data kualitatif adalah dokumen. Dokumen yang digunakan berhubungan dengan observasi yang dilakukan atau mendukung wawancara dan observasi peneliti. Dokumen yang ditulis sendiri oleh informan atau tulisan tentang mereka seperti sebagai autobiografi, memo, dokumen kebijakan, dokumen lain dapat ditemukan dalam file-file organisasi, dan arsip – arsip sejarah.

III.9 Teknik Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan serta laporan yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Dari hasil tersebut kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data, maupun untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data yang ada di lapangan adalah sebagai berikut :



1. Reduksi Data

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtiarikan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan sementara perlu diverifikasi. Teknik yang dapat digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.



4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

IV.1.1. Profil Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial Kota Makassar yang sebelumnya adalah kantor Departemen Sosial Kota Makassar didirikan berdasarkan keputusan presiden No. 44 Tahun 1974 Tentang susunan Organisasi Departemen beserta lampiran – lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan keputusan Presiden No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi jawatan sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten/kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan keputusan Walikota Makassar, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

Dinas Sosial Kota Makassar terletak di jalan Arif Rahman Hakim No. 50 Makassar, Kelurahan Ujung Pandang Baru, kecamatan Tallo Makassar, berada pada tanah seluas 499m², dengan bangunan fisik gedung berlantai 2 dan berbatasan dengan :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar
2. Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan rakyat



Sebelah barat berbatasan dengan jalan ujung pandang baru

Sebelah timur berbatasan dengan perumahan rakyat

IV.1.2 VISI, MISI DAN TUJUAN

1. VISI

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Visi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Pengendalian permasalahan sosial berbasis masyarakat tahun 2014. Maknanya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang di landasi oleh nilai – nilai kultur lokal yang di arahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian local sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat.

2. MISI

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Misi Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan kemitraan dan pemberdayaan sosial masyarakat dengan semangat kesetiakawanan sosial masyarakat.
- b. Memperkuat ketahanan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial melalui upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat yang rentang dan tidak beruntung
- c. Mengembangkan system perlindungan sosial



ukuran jaminan sosial

program rehabilitasi sosial secara optimal

- f. Mengembangkan pemberdayaan sosial

3. TUJUAN

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial, Maka Tujuan Dinas Sosial Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang bermartabat sehingga tercipta kemandirian local penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- b. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya dan potensi aparatur (struktural dan fungsional) dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mampu memberikan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang cepat, berkualitas dan memuaskan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi sosial masyarakat/stakeholders khususnya lembaga sosial masyarakat dan Orsos serta pemerhati di bidang kesejahteraan sosial masyarakat.

IV.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN KERJA

Struktur organisasi merupakan kerangka yang terdiri dari bermacam-macam fungsi menurut pola tertentu, yang menyatakan adanya urutan dan tanggung jawab antara bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi ini sangat penting peranannya bagi suatu instansi untuk hubungan kerja sama antara bagian-bagian yang terdapat di dalam instansi dan juga dengan adanya struktur organisasi ini maka masing-masing bagian dapat mengetahui dengan jelas apa tugasnya, wewenangnya dan kepada

reka bertanggung jawab.



Berdasarkan peraturan Walikota Nomor 34 tahun 2009 tentang uraian tugas jabatan structural pada Dinas Sosial Kota Makassar, maka jabatan structural pada Dinas Sosial Kota Makassar sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian tata usaha terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
 1. Seksi penyuluhan dan Bimbingan Sosial
 2. Seksi Bimbingan Kesejahteraan Masyarakat
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:
 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cepat
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
 - e. Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
 1. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial
 2. Seksi Penanganan Korban Bencana
 - f. Bidang Bimbingan Organisasi terdiri dari:
 1. Seksi Bimbingan Sumbangan Sosial
 2. Seksi Bimbingan Organisasi Sosial
 - g. UPTD
2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Sebagaimana tercantum Pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan



di
ini.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Jabatan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijaksanaan Walikota dan Peraturan perundang –undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas Dinas

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang usaha kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
- b. Perencanaan dan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial serta bimbingan organisasi sosial.
- c. Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial.
- d. Pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang usaha kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan kesejahteraan sosial dan bimbingan organisasi sosial.

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha Memberikan Pelayanan administrative bagi seluruh satuan kerja di lingkungan dinas sosial .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1),
ata Usaha menyelenggarakan fungsi :

Pengelolaan ketatausahaan



- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan keuangan
- d. Pelaksanaan urusan perlengkapan
- e. Pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga
- f. Pengkoordinasian perumusan program kerja

3. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial Mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandangan, pengemis, tuna susila, penderita cacat, dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba.

Dalam melaksanakan tugas sebagai di maksud pada ayat(1), Bidang Rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan barang perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna susila (gelandangan pengemis, eks napi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan)
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitas sosial penyandang cacat.
- c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan system informasi kesejahteraan sosial
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyeleng urusan kepahlawanan dan keperintisan
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan

sejahteraan sosial

pengelolaan administrasi urusan tertentu.



4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak jalanan, rehabilitasi gelandang, pengemis, tuna susila, penderita cacat dan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1).

Bidang rehabilitasi sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna susila (gelandangan pengemis, eks napi, tuna susila, waria, anak nakal dan anak jalanan)
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi sosial penyandang cacat
- c. Penyiapan bahan penyusun rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (gelandangan, pengemis dan eks nara pidana, tuna susila/waria, anak nakal dan anak jalanan)
- d. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulasi usaha ekonomi produktif
- e. Penyiapan bahan bimbingan an pengendalian teknis penanggulangan korban NAPZAH dan pengidap HIV/AIDS
- f. Penyiapan bahan penyusunan bahan rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migrant(anak, wanita dan usia lanjut) lingkup kota
- g. Pengelolaan administrasi urusan tertentu



5. Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemerian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pemberian bantuan kepada masyarakat miskin serta bantuan kepada korban bencana dan musibah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bantuan dan pelayanan jaminan kesejahteraan sosial
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, RSDK (Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh)
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penanggulangan korban bencana alam dan bencana sosial lingkup kota
- d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberian bantuan usaha ekonomi produktif keluarga tidak mampu.
- e. Pengelolaan administrasi urusan tertentu

6. Bidang Bimbingan Organisasi

Bidang Bimbingan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan terhadap organisasi sosial pembinaan, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), bidang bimbingan organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program bimbingan organisasi sosial



- b. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyuluhan di bidang sosial
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan karang taruna, organisasi sosial /LSM/Organisasi profesi, WKSBM(Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat)
 - d. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)
 - e. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pemberdayaan dunia usaha(partisipasi dalam UKS)
 - f. Penyiapan bahan bimbingan dan penegndalian teknis pengumpulan sumbangan sosial lingkup kota.
 - g. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis kegiatan penertiban terhadap usaha-usaha pengumpulan sumbangan dan undian berhadiah oleh ORSOS yayasan atau kelompok masyarakat.
 - h. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini adalah unsur pelaksana operasional dinas yang di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
 - b. Pembentukan Unit Pelakasana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan di tetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai kebutuhan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku



8. Subbagian dan Seksi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi subbagian dan seksi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota

C. Tata Kerja

1. Pasal 15

- a. Bagian Tata Usaha dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- b. Subbagian Dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Tata Usaha atau Kepala Bidang

2. Pasal 16

- a. Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
- b. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas
- c. Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



- d. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan oprganisasi dan bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

3. Pasal 17

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakli dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku

- Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pejabat Eselon II, III, dan IV dalam organisasi Dinas Sosial diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Ketentuan dalam Peralihan

Pemangku jabatan di lingkungan Dinas Sosial setiap memangku jabatannya sampai dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.

- Ketentuan Penutup

Hal – hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar (Lembaga Daerah Kota Makassar Nomor 19 tahun 2001 Seri D Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

IV.2 Profil Kecamatan Biringkanaya

IV.2.1 Profil Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu bagian Wilayah Timur Kota Makassar dengan memiliki luas lahan seluas 48,22 km² atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Secara administratif Kecamatan Biringkanaya dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar
- Bagian Utara : Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros
- Bagian Timur : Kecamatan Mandai Kabupaten Maros
- Bagian Barat : Kecamatan Tallo Kota Makassar

Kecamatan Biringkanaya mempunyai 14 Kelurahan yaitu Bulurokeng, Untia Sudiang, Pai, Daya, Paccerakkang, Sudiang Raya, Bakung, Laikang, Berua dan Katimbang. Secara geografis Kecamatan Biringkanaya memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 65% dari total keseluruhan wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah. Kecamatan Biringkanaya berada pada ketinggian 500m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Biringkanaya

23-26 C°. Sedangkan dilihat dari curah hujan berkisar 2000 mm/th dan ari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 30 hari.



Misi merupakan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dari organisasi atau instansi tersebut. Adapun Misi Kecamatan Biringkanaya yaitu:

1. Mendorong Penguatan dan Partisipasi Masyarakat pada semua aspek pembangunan.
2. Mendukung Pemerintah Kota untuk mewujudkan Ruang Kota yang Ramah Lingkungan
3. Meningkatkan pelayanan prima Kecamatan terhadap seluruh lapisan masyarakat
4. Mendorong Peningkatan Kualitas SDM serta peran serta masyarakat dalam pembangunan
5. Mendorong dan meningkatkan Penyelenggaraan Pengembangan Perekonomian wilayah Kecamatan dan Kelurahan
6. Meningkatkan dan mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kemasyarakatan.

IV.2.3 Kependudukan Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya memiliki jumlah penduduk sebanyak 140.031 jiwa, yang terdiri dari 71.038 jiwa laki-laki dan 68.993 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Biringkanaya saat ini mencapai sekitar 34.222 KK. Berdasarkan data kependudukan dari Kecamatan pada tahun 2017 dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan bertambah dari waktu ke waktu.



Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk Berdasarkan Kepadatan Penduduk

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan Per Km ²
1	Bulurokeng	5,5	3.581	16.482	875
2	Untia	2,9	520	2.073	715
3	Sudiang	13,4	5.924	18.818	1,404
4	Pai	15,4	5.324	18.327	1,190
5	Daya	6,23	2.559	12.857	965
6	Paccerakkang	2,70	4.072	15.362	5,689
7	Sudiang Raya	4,78	4.591	19.506	2,689
8	Bakung	5,44	3.165	13.613	1,147
9	Laikang	4,35	3.578	25.653	2,285
10	Berua	3,89	2.267	13.494	1,690
11	Katimbang	3,21	9.003	11.255	3506

Sumber : Profil Kecamatan Biringkanaya Tahun 2019

IV.2.4 Kondisi Aparatur Pemerintahan Kecamatan

Jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Biringkanaya adalah sejumlah 85 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan sebanyak 20 orang.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan sebanyak 65 orang.
3. Tenaga Operator Komputer 3 orang (status kontrak dari Dinas Kependudukan).



Tabel 4.2 Komposisi Karyawan Kecamatan Biringkanaya

No	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN (TMT)
1.	DR. H. Andi Syahrums SS.,SE.,M.Si	IV/b	Camat
2.	Mahyuddin, S.STP, M.AP	IV/b	Sekretaris Camat
3.	Muhammad Syarif, SE.,M.Si	III/b	Kasubag Umum & Kepegawaian
4.	Moh.Dwi Aditya Mukhtar, S.STP	III/b	Kasubag Perencanaan & Keuangan
5.	H. Andi Dudi Pamadeng, SE.,MM	III/d	Kasi Pemerintahan Kinerja Lurah dan RT/RW
6.	Drs.Syarifuddin, MM	IV/a	Kasi Trantib & Penegakan Perda
7.	Wuriyanti Saptorini, S.Sos	III/d	Kasi Ekonomi & Pembangunan
	Andi Suriyanti, SE.,M.Si	III/d	Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Kesos



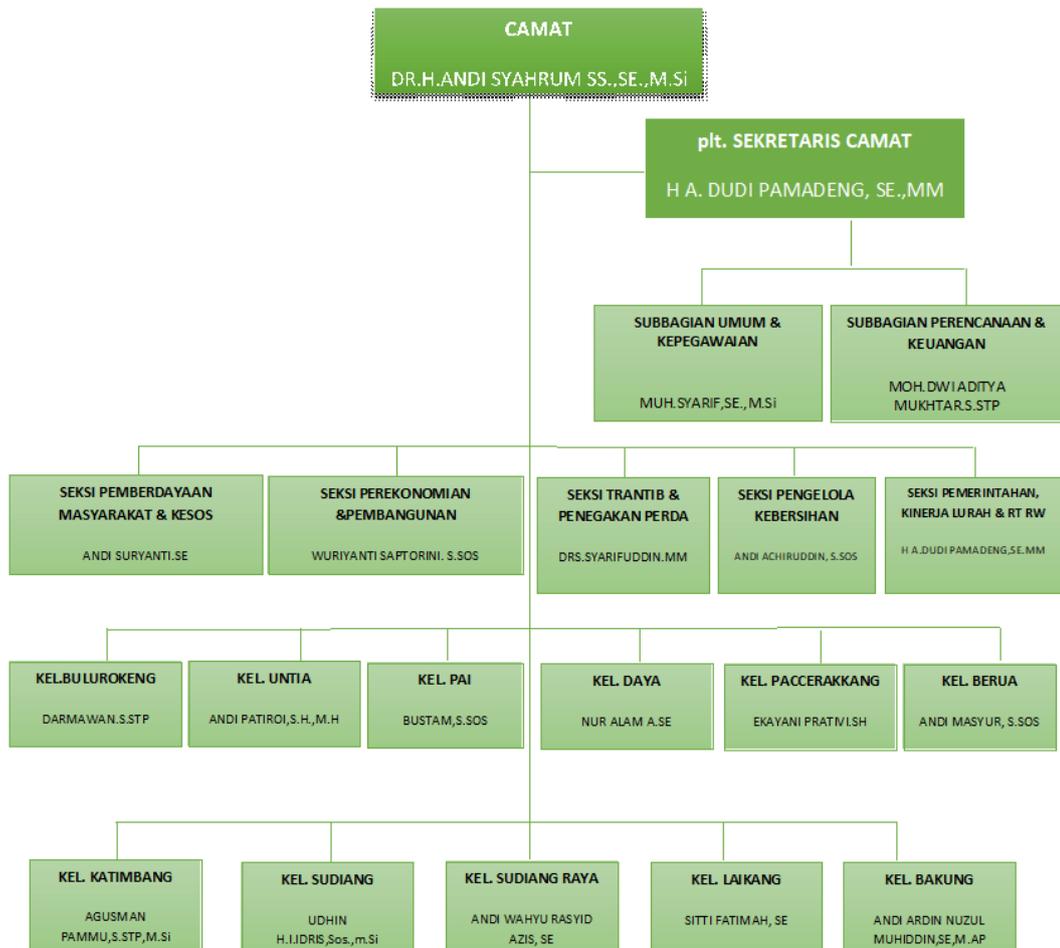
9.	Andi Achiruddin,S.Sos	III/d	Kasi Pengelolaan Kebersihan
10.	Sariyanah, SE	III/a	Pelaksana
11.	Jayanti Makasari, A.Md.Komp	II/d	Pelaksana
12.	Hj. Aminahwawir, S.Sos	III/a	Pelaksana
13.	Sahriah Landareka	II/c	Pelaksana
14.	Kariati, S.Ag	III/b	Pelaksana
15.	Dedi Samsudi	II/b	Pelaksana
16.	Syafaruddin Sahido	II/a	Pelaksana
17.	Djuhri	I/d	Pelaksana
18.	Kannu Paliwang	I/b	Pelaksana
19.	Budianto Padang	I/c	Pelaksana
20.	Katong Padang	I/b	Pelaksana
	Norma	II/b	Pelaksana



Profil Kecamatan Biringkanaya Tahun 2019

IV.2.5 Struktur Organisasi

GAMBAR 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan menggunakan teori menurut Sutrisno dalam (Lestari & Murti, 2015) yaitu dilihat dari pemahaman program, tepat sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT merupakan program baru yang diselenggarakan oleh pemerintah dan diberikan kepada masyarakat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2017. Sebelum dikenal dengan nama Program BPNT dulu program ini sering dikenal masyarakat sebagai Program Raskin (Beras Miskin). Namun berganti nama menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan konsep yang lebih modern.

Sistem yang digunakan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yakni menggunakan sistem kartu kombo atau sering disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DT-KS) dan berhasil melalui tahapan verifikasi data maupun validasi data. Dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera para penerima manfaat program BPNT akan mendapatkan saldo rekening sebesar Rp. 110.000/Bulan, namun

Januari hingga Agustus 2020 jumlah saldo penerima BPNT bertambah Rp. 200.000/Bulan. Saldo tersebut akan dicairkan kepada agent Brilink



untuk menukarkan saldo tersebut dengan kebutuhan pokok pangan seperti beras, telur, dan daging ayam.

Secara terperinci, peneliti akan menjabarkan hasil wawancara dari nerasumber yang terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sesuai dengan indikator penelitian :

V.1 Pemahaman Program

Pemahaman program bertujuan untuk menganalisis seberapa baik sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberikan pemahaman mengenai program BPNT khususnya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelaksana sosialisasi adalah Tim Koordinasi Bantuan Pangan Kota Makassar, pendamping sosial, aparaturn daerah, serta bank penyalur. Program BPNT ini dilakukan dengan menyelenggarakan beberapa sosialisasi ke masyarakat terkait mekanisme pelaksanaan program dan pemanfaatan BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan KPM. Selain itu, tahap registrasi KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dilakukan sebagai berbentuk pendataan dan survey kepada KPM agar bantuan BPNT tersebut dapat disalurkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pihak Dinas Sosial Kota Makassar bidang Kesejahteraan Sosial, mengatakan bahwa:

“Setiap program yang dilakukan dinas sosial selalu ada sosialisasinya termasuk program BPNT supaya masyarakat juga paham mengenai tujuan bantuan ini. Di setiap kecamatan ada sosialisasinya kepada keluarga penerima manfaat dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan petugas pendamping BPNT.”

(Wawancara pada tanggal 31 Maret 2020)



Hal serupa juga di ungkapkan oleh salah satu Pegawai di Divisi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial kota Makassar, yang mengatakan bahwa:

“Sosialisasi BPNT diadakan oleh KorDa (Koordinator Daerah) yang mengundang semua agen penyalur seperti Bulog, Poldas selaku pendamping Bansos, jadi ada sosialisasi yang diadakan di satu tempat tetapi KorDa yang adakan kami hanya datang mendampingi dan melihat. Sosialisasi BPNT biasa diadakan setiap bulan namun tidak menentu tergantung anggaran sosialisasi Kemensos.”

(Wawancara pada tanggal 8 Juni 2020)

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK Biringkanaya) Kota Makassar, bahwa:

“Sosialisasi sudah dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang BPNT. Pelaksanaan program BPNT sudah berjalan sejak 2017 dan kami juga melakukan pendataan kepada keluarga penerima bantuan, untuk warga yang berhak menerima BPNT harus menyerahkan berkas seperti Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan, dan harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).”

(Wawancara pada tanggal 27 April 2020)

Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari beberapa masyarakat penerima BPNT, berikut penjelasannya:

Informan DN, mengatakan bahwa :

“Pernah ada sosialisasi di Kantor Camat tapi saya tidak datang karena cuma perwakilan saja seperti ketua RW baru nanti dia yang menjelaskan ke warganya”.

(Wawancara pada tanggal 4 April 2020)

Kemudian ditambahkan oleh informan berinisial HA, mengatakan bahwa:

“ ada sosialisasi tetapi saya jarang pergi karna saya juga sudah tua nak baru jauh juga tempatnya. Biasanya ada orang kelurahan yang datang untuk informasikan kalau tentang bantuan ini”.

(wawancara pada tanggal 5 April 2020)



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar dalam memberikan pemahaman tentang program BPNT kepada masyarakat yaitu dengan melakukan Sosialisasi program BPNT. Dalam metode sosialisasi BPNT yaitu pihak KorDa (Koordinator Daerah) mengundang pihak terkait dalam penyaluran bantuan, seperti Bulog, Polda, pendamping BPNT Dinas Sosial Kota Makassar, dan pihak bank terkait (Bank BRI untuk wilayah Kota Makassar) serta mengundang aparat daerah untuk mengikuti sosialisasi tersebut, aparat daerah inilah yang akan menyampaikan kepada masyarakat lainnya yang ada di Kecamatan Biringkanaya terkait program BPNT. Sejauh ini berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang menerima, mereka cukup memahami mekanisme penyaluran program BPNT selama ini mereka terima, dimana pemerintah sebagai penyelenggara program BPNT dapat memberikan informasi yang jelas kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), begitupun masyarakat sebagai penerima program BPNT bisa menerima informasi terkait mekanisme program tersebut.

V.2. Tepat Sasaran

Tepat sasaran menunjukkan apa yang dikehendaki menjadi tercapai atau menjadi kenyataan atau dengan kata lain berarti sasaran yang ingin dicapai sesuai rencana. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah penyaluran program BPNT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar telah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Dalam menentukan program BPNT diperlukan sistem informasi yang baik dan pembinaan kukan secara intensif. Apakah program yang dilaksanakan bermanfaat



bagi yang menerima atau tidak. sehingga indikator ini penting digunakan untuk mengetahui efektivitas program.

Dalam penentuan calon penerima program BPNT yang ditetapkan oleh kemensos adalah masyarakat yang termasuk dalam kelompok Desil 2 (kelompok rumah tangga miskin dengan peringkat kesejahteraan terendah mencapai 10-20 %) pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Gambar 5.1 Basis Data Terpadu



Sumber: (Bdt.tnp2k.go.id, 2018)

Kriteria penerima bantuan sosial adalah Kartu Keluarga yang telah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada tahun 2020, rian Sosial mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan SIKS-NG) dengan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan 1 sasaran pada DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh



Kemensos dan Pemerintah Daerah. Hal ini dibenarkan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan Biringkanaya, mengatakan bahwa:

“Kriterianya sangat sulit digambarkan karena kita tidak diberi kewenangan untuk menentukan siapa penerima BPNT, kita hanya mengisi form nasional seperti rumahnya apa? dindingnya apa?, lantainya apa?,dll. Setelah kita mengisi form kemudian kita kirim melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Berdasarkan form itu, kriteria untuk masuk sebagai penerima bantuan ditentukan oleh Kemensos berdasarkan rumus yang mereka gunakan”.

(Wawancara pada tanggal 27 April 2020)

Pihak Dinas Sosial Kota Makassar juga mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan data penerima bantuan yang diterima dari Kementerian Sosial kita salurkan bantuannya kepada penerima BPNT yang terdaftar dan disetiap kecamatan ada koordinator yang bertanggung jawab di lapangan”.

(Wawancara pada tanggal 31 Maret 2020)

Informan RL selaku salah satu KorDa di kecamatan Biringkanaya, mengatakan bahwa:

“kalau terkait yang menerima bantuan ini rata-rata memang layak mendapatkan bantuan, tetapi tidak bisa di pungkiri kalau masih ada juga masyarakat yang bisa di bilang “cukup” tapi masih terima juga,ada juga yang sudah meninggal tapi namanya masih ada sebagai penerima, kita sudah laporkan di pihak kelurahan tapi mungkin datanya ada bermasalah jadi dia masih terima sampai sekarang”.

(Wawancara pada tanggal 4 April 2020)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, program BPNT di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar bisa dikatakan masih kurang tepat sasaran. Hal ini didasari oleh beberapa pengaduan dari beberapa pendamping program dan masyarakat kepada Koordinator Daerah yang menangani program

ing masih mengeluhkan mengenai sasaran penerima program BPNT
dieluarkan oleh Kementerian Sosial.



Hal ini dikarenakan data pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kemensos) yang menjadi dasar penentuan bagi penerima program BPNT belum diperbarui secara maksimal, yang menyebabkan data penerima bantuan kemiskinan hanya berputar di data lama saja dan masih terdapat kesalahan data seperti: kesalahan nama penerima, penerima yang sudah meninggal namun masih terdaftar maupun penerima yang berpindah domisili namun masih terdaftar di alamat yang lama. Selain itu, tidak adanya kejelasan mengenai pembagian tingkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) bagi masyarakat yang berhak menerima program bantuan kemiskinan dari pemerintah karena pendataan yang dilakukan oleh daerah hanya sebatas mendata masyarakat berdasarkan form pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), kemudian data tersebut dikelola di pusat untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan menerima penyaluran bantuan tersebut berdasarkan data yang diisi oleh Pemerintah daerah yang kemudian Pemerintah pusat menetapkan keluarga yang berhak menerima program bantuan kemiskinan.

V.3 Tepat Waktu

Berkaitan dengan sesuai atau tidaknya waktu pelaksanaan suatu program dengan target waktu yang direncanakan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui apakah penyaluran BPNT sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau tidak.

Berdasarkan pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2017 yang disusun oleh Kementerian/Lembaga lintas sektor terkait, penyaluran BPNT ke rekening BPNT keluarga penerima manfaat (KPM) dijadwalkan



setiap tanggal 10(sepuluh)/ bulan. Penyaluran BPNT dilakukan oleh pihak bank yang menjalin kerjasama dengan Kemensos untuk kota Makassar sendiri dilakukan oleh bank BRI. Pencairan bantuan kepada KPM berdasarkan data yang diterima dari Kemensos melalui bank penyalur.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu penerima BPNT berinisial ID di Kecamatan Biringkanaya, mengatakan bahwa:

“kalau mengenai waktu pengambilannya biasanya pertengahan bulan, tanggal dua puluh-an, tidak menentu ki juga biasa tanggal dua puluh lima atau dua puluh enam, dan biasa di informasikan dari kelurahan kalau bisami ambil bantuan di E-Warong”.

(Wawancara pada tanggal 4 April 2020)

Ditambahkan oleh salah satu penerima bantuan berinisial M, mengatakan bahwa:

“waktu penukaran bantuannya tidak menentu dek biasanya saya tanggal lima belas ku gesek kartunya di E-Warong”.

(Wawancara pada tanggal 5 April 2020)

Berdasarkan wawancara dengan petugas E-Warong sebagai tempat penukaran program BPNT, mengatakan bahwa:

“kalau untuk waktu penukaran bantuannya itu tidak menentu karena saldonya kan tidak rutin masuk terkadang dibawah tanggal 10 terkadang tanggal 10 keatas, yang penting saya sebagai penyalur kalau masuk hari ini saldonya dan besok datang pangannya dari Bulog saya adakan penyaluran. kalau untuk waktu penyalurannya ke masyarakat biasanya seminggu. Untuk kendalanya terkadang mereka lagi pergi kerja atau pulang kampung jadi biasanya kita suruh datang bersamaan mereka tidak bisa”.

(Wawancara pada tanggal 5 April 2020)



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti para penerima program BPNT dapat diketahui ketepatan waktu

penyaluran bantuan BPNT masih kurang efektif. Salah satu penerima BPNT merasa kecewa karena waktu penyaluran bantuan yang tidak menentu setiap bulannya, sehingga mereka harus menutupi kebutuhan pangan keluarga mereka sendiri hingga saldo BPNT dapat di tukarkan pada E-Warong. Hal ini dikarenakan penyaluran bantuan BPNT yang rencana disalurkan rutin setiap awal bulan namun pada kenyataannya sering mengalami keterlambatan yang dikarenakan saldo dari pusat belum masuk ke rekening KPM.

Keterlambatan tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Dinas Sosial karena pihak pusat bekerja sama langsung dengan pihak bank BRI yang merupakan bank penyalur untuk BPNT wilayah kota Makassar untuk penyaluran dana bantuan. Adapun tugas dari dinsos untuk mengevaluasi dan menyampaikan keluhan-keluhan dari KPM tentang keterlambatan penyaluran bantuan.

V.4 Tercapainya Tujuan

Pencapaian tujuan dari program BPNT dapat dilihat dari terwujudnya harapan dari adanya program BPNT ini yaitu menanggulangi kemiskinan dengan cara penyaluran bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat berupa pemenuhan sebagian kebutuhan pangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan serta derajat kehidupan sosial ekonomi masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Bantuan pangan non tunai hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai dengan kebutuhan di *E-Warong*. Bantuan tersebut dapat sisakan dan akan terakumulasi dalam rekening BPNT. Penentuan s pangan dalam program BPNT bertujuan untuk menjaga kecukupan



gizi KPM. Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi permintaan dari penerima.

Informan DI selaku salah satu penerima BPNT, mengatakan bahwa:

“bantuannya waktu itu berupa 10 kg beras sama 2 rak telur, sama ada juga ayamnya tapi kecil dan sekali itu saja bulan lalu (Februari 2020) tapi setelah itu tidak pernah lagi”.

(Wawancara pada tanggal 5 April 2020)

Kemudian, informan S mengatakan bahwa:

“bantuan yang ku terima itu beras sama telur, kalau ayam tidak ada tapi ada penambahan jumlah jadi waktu itu ku terima 15kg beras sama 2 rak telur”.

(Wawancara pada tanggal 7 April 2020)

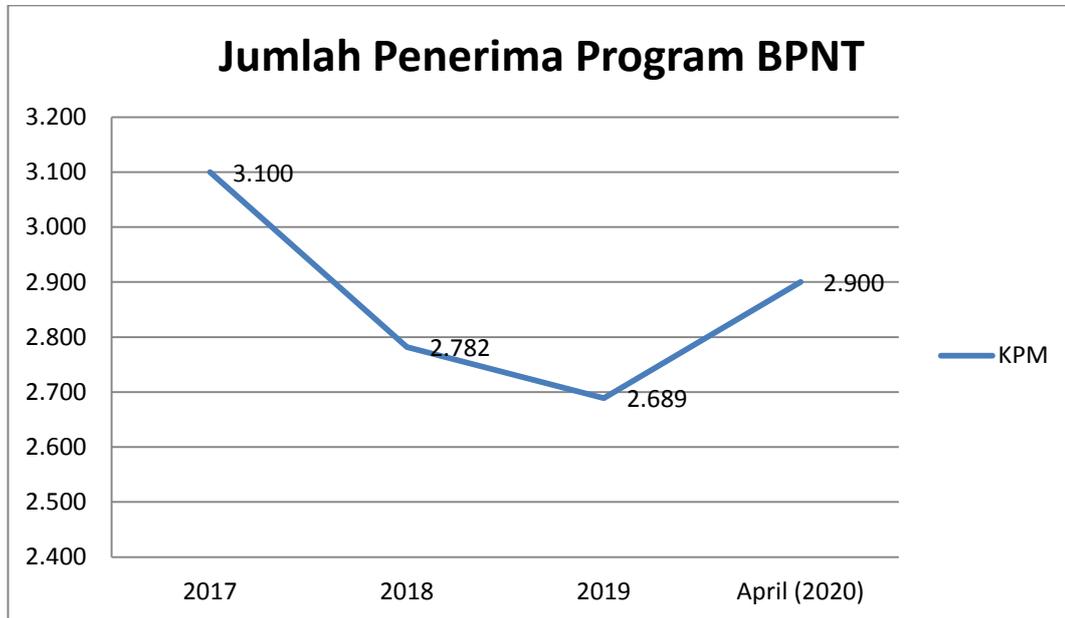
Berbeda dengan hasil wawancara bantuan yang diterima oleh penerima BPNT, pihak pengelola TKSK biringkanaya lebih mendetail menjelaskan mengenai progres jumlah penerima program BPNT, sebagaimana hasil wawancara yang di dapatkan sebagai berikut:

“sekarang programnya kita itu menggraduasi artinya mengeluarkan, kalau sudah dianggap tidak layak lagi menerima bantuan harus dikeluarkan oleh pendamping BPNT dan setiap 4 bulan diverifikasi sesuai fakta dilapangan. Kalau dilihat dari jumlah penerima BPNT yang berkurang setiap tahun berarti tujuan dari program ini berhasil karena masyarakat merasa terbantu, tetapi untuk tahun 2020 itu ada peningkatan karena adanya pandemic covid-19 ini”.

(Wawancara pada tanggal 27 April 2020)



Gambar 5.2 Jumlah penerima BPNT Kecamatan Biringkanaya



Sumber : TSKK kecamatan Biringkanaya

Di Kota Makassar program BPNT sudah dimulai sejak tahun 2017. pada tahun 2017 jumlah penerima BPNT sebanyak 3.100 KPM dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 2.782 KPM. Pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan menjadi 2.689 KPM dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah mencapai 2.900 KPM hal ini disebabkan karena perubahan program menjadi Sembako Murah pada akhir 2019 semenjak pergantian Menteri Sosial dan adanya pandemi covid-19.

Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya pada tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 5.1 Rekap Bantuan Sosial Januari 2020

KECAMATAN	KELURAHAN	RUMAH TANGGA	KELUARGA	INDIVIDU	BANSOS PANGAN
Biringkanaya	Paccerakkang	2578	2650	11564	646
	Daya	579	600	2430	181
	PAI	885	898	3739	389
	Sudiang Raya	2427	2595	11490	503
	Sudiang	1736	1934	7973	427
	Bulurokeng	588	627	2447	251
	Untia	310	337	1522	162

Sumber : SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hingga januari 2020 jumlah penerima BPNT dari 7 kelurahan yang berada di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 2.559 KPM. Jumlah penerima bantuan sosial terbanyak berada pada kelurahan Paccerakkang dengan jumlah penerima 646 KPM, sedangkan kelurahan Untia terendah dengan jumlah penerima 162 KPM.

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti, tujuan dari program BPNT telah tercapai. Pemberian nutrisi yang seimbang dan melihat dari jumlah penerima program BPNT yang mengalami penurunan sejak tahun 2018 membuktikan bahwa masyarakat semakin sejahtera dengan adanya program ini. Akan tetapi, berdasarkan indikator sebelumnya masih belum maksimalnya ketepatan sasaran dan ketepatan waktu penyaluran bantuan ini yang perlu ditingkatkan. Sehingga dalam indikator tercapainya tujuan program BPNT di Kecamatan Biringkanaya sudah cukup efektif dalam memenuhi kebutuhan keluarga penerima bantuan, di sisi lain pemerintah perlu meningkatkan evaluasi dan melakukan survey lapangan untuk memperbaharui data terpadu kesejahteraan masyarakat yang menjadi acuan dalam menentukan penerima bantuan di



Kecamatan Biringkanaya serta memberikan kejelasan waktu penyaluran BPNT bagi penerima.

V.5 Perubahan Nyata

Perubahan nyata menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Biringkanaya sebelum dan sesudah menerima program BPNT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Program BPNT diharapkan mampu merubah keadaan sosial ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin.

Dengan Adanya program BPNT ternyata kondisi kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang cukup baik. Hal ini dibenarkan Ibu SA salah satu penerima program BPNT di kecamatan Biringkanaya yang mengatakan bahwa:

“perubahan yang paling saya rasakan itu terbantu untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari, dan penerima juga harus pintar-pintar mengelola bantuan supaya cukup”.

(Wawancara pada tanggal 4 April 2020)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu HA, bahwa:

“saya rasa sudah baik karena ada sedikit bantuan untuk membantu kehidupan kami sehari-hari, program ini juga mengurangi beban hidup karena pendapatanku yang tidak menentu”.

(Wawancara pada tanggal 5 April 2020)

Pernyataan diatas didukung oleh informan MA, mengatakan bahwa:

“tahun-tahun sebelumnya kualitas berasnyakurang baik, tapi tahun ini kualitas berasnya sudah cukup baik dan beban pengeluaran juga berkurang karena adanya bantuan ini”.

(Wawancara pada tanggal 5 April 2020)



Berdasarkan hasil observasi dan wawancara oleh peneliti, perubahan nyata yang dapat dilihat di Kecamatan Biringkanaya sudah efektif. Menurut keluarga penerima bantuan, BPNT telah berjalan dengan baik dan mampu mengurangi beban kebutuhan pangan keluarga penerima bantuan dan juga petugas setiap tahunnya melakukan verifikasi data dan memantau jalannya program BPNT. Dengan pemantauan dan kerjasama yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas pangan yang dijual di E-Warong. KPM juga diberikan kemudahan dalam melakukan pengaduan jika ditemukan masalah pada saat pelaksanaan program BPNT.

Program BPNT dalam pencapaian tujuan pada pelaksanaannya diharapkan dapat memberikan perubahan yang nyata pada setiap elemen dalam program ini. Pemerintah diharapkan mampu meng-update data maupun teknologi serta mampu merubah tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera untuk perubahan yang lebih baik.

Tabel 5.2 Hasil Penelitian Program BPNT di Kecamatan Biringkanaya

Indikator	Uraian	Keterangan
Pemahaman Program	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah memahami mekanisme penyaluran BPNT melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak terkait yaitu Koordinator Daerah (Korda),	Efektif



	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Dinas Sosial	
Tepat Sasaran	Tepat sasaran merupakan penilaian penting dalam mengukur keberhasilan suatu program.. Akan tetapi, program BPNT masih belum berhasil dalam menentukan sasaran penerima yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa KPM yang bukan termasuk dalam kelompok Desil 2 dalam Basis Data Terpadu (BDT) di daerah pelaksana sesuai dengan syarat peserta program BPNT yang termasuk dalam kategori sosial ekonomi sangat cukup.	Kurang Efektif
Tepat Waktu	Pelaksanaan program BPNT acapkali mengalami keterlambatan dalam waktu penyaluran bantuan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kejelasan waktu penyaluran bantuan sehingga banyak KPM yang mengeluhkan mengenai keterlambatan pencairan dana bantuan hingga akhir bulan yang	Kurang Efektif



	membuat KPM harus memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu.	
Tercapainya Tujuan	<p>Program BPNT hadir sebagai bentuk bantuan sosial pemerintah dalam mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Biringkanaya dalam mencapai tujuan program BPNT ini sudah cukup efektif bagi penerima bantuan. Hal ini dapat dilihat dari KPM yang sudah merasakan manfaat program BPNT seperti dana bantuan dan kualitas bahan pangan yang sudah membaik, KPM juga dibantu oleh pemilik E-Warong dalam menggunakan dana bantuan untuk kebutuhan pangan. Meskipun jumlah dana yang diterima masih kurang menurut beberapa KPM serta alokasi waktu dan sasaran yang masih kurang efektif, tetapi bantuan ini sudah sangat membantu dalam pemenuhan gizi seimbang dengan</p>	Cukup Efektif



	diiringi kualitas pangan yang semakin baik dan mampu meringankan beban pengeluaran KPM.	
Perubahan Nyata	Program BPNT sudah dapat dikatakan memberikan perubahan yang nyata yang mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan serta keluarga yang mampu meningkatkan gizi makanan sehari-hari didukung dengan kualitas bantuan pangan yang semakin baik.	Efektif

V.6 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, menemui beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mencapai efektivitas program. Faktor pendukung tersebut meliputi :

1. Tingginya partisipasi masyarakat dalam menerima program BPNT untuk mengetahui informasi mekanisme penyaluran BPNT
2. Lokasi E-Warong/tempat penukaran BPNT yang strategis. Jarak antara E-Warong/tempat pencairan bantuan dengan tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak begitu jauh, di setiap kelurahan memiliki minimal satu E-Warong/tempat penukaran bantuan



frastuktur pendukung yang memadai, seperti mesin EDC bank dalam kondisi baik pada saat waktu pencairan program BPNT

4. Komitmen pemerintah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan program BPNT dengan melakukan verifikasi data penerima program BPNT

Sedangkan faktor penghambat dalam mencapai efektivitas program BPNT di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, meliputi :

1. Data penerima BPNT yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial masih kurang valid, dikarenakan masih terdapat duplikasi data, kesalahan nama penerima, meninggal dunia, perpindahan domisili penduduk yang masih tercatat sebagai penerima
2. Waktu pelaksanaan program BPNT yang direncanakan akan diberikan rutin setiap bulannya kepada keluarga penerima manfaat masih sering mengalami keterlambatan yang disebabkan karena waktu pencairan dana dari pusat yang tidak menentu



BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis hasil wawancara dan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sudah cukup efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari analisis teori yang digunakan, yaitu : pemahaman masyarakat mengenai program BPNT dapat dikatakan baik dikarenakan sosialisasi yang dilakukan di masyarakat telah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyaluran BPNT, tujuan dari adanya program BPNT juga telah terlaksana dengan baik, masyarakat sudah merasakan manfaat dari adanya bantuan ini yang dapat mengurangi beban pembelian kebutuhan pangan KPM, serta perubahan nyata yang dirasakan masyarakat yang sudah terbantu khususnya dalam hal pengeluaran pangan, memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Meskipun di sisi lain, masih ada hal yang perlu diperbaiki pada program ini seperti dikarenakan ketepatan sasaran penerima bantuan program BPNT dapat dikatakan masih kurang tepat melihat masih terdapat duplikasi data yang terdaftar dalam penerima BPNT. Begitu juga waktu program BPNT yang direncanakan akan diberikan rutin setiap bulannya kepada KPM masih sering mengalami keterlambatan yang disebabkan karena pencairan dana dari pusat yang tidak menentu sehingga ketepatan waktu

ram BPNT belum efisien dan maksimal.



VI.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis bermaksud memberikan saran terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar :

1. Memaksimalkan koordinasi antara Dinas Sosial Kota Makassar dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait terutama Bank penyalur (BRI) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. Petugas harus bersikap profesional dalam melakukan survey langsung dilapangan dan mengupdate data pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan validitas data
3. Meningkatkan koordinasi antara pihak terkait dan pemerintah pusat agar penyaluran BPNT dilakukan rutin setiap bulan dan sesuai dengan tanggal yang ditentukan
4. Besaran bantuan yang diterima KPM perlu ditingkatkan agar tujuan dari program BPNT untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Anas, M. A. (2017). *Studi Deskriptif Tentang Efektivitas Program Lamongan Green and Clean (LGC) di Kabupaten Lamongan*. Universitas Airlangga.
- Bdt.tnp2k.go.id. (2018). *Tanya Jawab Umum Berbasis Data Terpadu*.
- Budiani, N. W. (2005). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna " Eka Taruna Bhakti " Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Ekonomi Dan Sosial (Unud)*.
- Dini, A. R. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kelurahan Gulak Galik Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.
- Djabbar Ramlawati. (2013). *Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo*. Universitas Hasanuddin.
- Gunawan, H. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iqbal, M. Z. K. (2018). *Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di Kota Malang (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Malang dan Unit Pelaksana Teknis Malang Utara dan Batu Periode Tahun 2016 dan 2017)*. Universitas Brawijaya.
- Junaidi, M. S. (2018). Komparasi Kepuasan Penerima Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Dan Penerima Rastra Di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.21009/Econosains.0152.08>
- Kemensos.go.id. (2019). *Kemensos dan Perum Bulog Bersinergi Menyalurkan BPNT*.
- Kementerian Sosial, & dkk. (2017). *Buku Pedoman Umum Program Bantuan Pangan Non Tunai*.
- Kementerian Sosial, & Dkk. (2019). *Rangkuman Informasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*.
- Lestari, R. P., & Murti, I. (2015). *Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri)(Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo*. 195–201.
- Mubandji D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Presiden RI. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Presiden RI. (2017). *Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun*



2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

- Pratama, & Fauzi. (2018). Efektivitas Program Bimbingan Kerja dalam Mengembangkan Life Skill Warga Binaan Penjara. *Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi, I. N. (2005). *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Universitas Diponegoro.
- Tiara Rohana, M. (2019). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. *Demography Journal of Sriwijaya, Vol. 6, No.*
- Toad, V. S., Rares, J., & Pombengi, J. (2018). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik, 4(58)*.
- Undang-Undang. (2011). *Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Berhak Memperoleh Kecukupan Pangan, Sandang, dan Perumahan*.
- Undang-Undang RI. (1996). *UU RI No.7 Tahun 1996 tentang Pangan*.
- Wahab. (2004). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.



L A M P I R A N



Optimized using
trial version
www.balesio.com

IDENTITAS DIRI



Identitas Pribadi

Nama Lengkap : Winnie Thalia
N I M : E211 16 007
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 7 Desember 1998
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pondok Asri II Blok G1 No. 17, Sudiang
No. Telepon : 085399588151
Email : winniethalia@yahoo.com

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Yohanes Ari
Nama Ibu : Yuti Karti



Pendidikan

↳ Frater Bakti Luhur 2003 - 2004
D Frater Bakti Luhur 2004 - 2010
MP Frater Makassar 2010 - 2013

- SMA Negeri 15 Makassar 2013 – 2016
- Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Riwayat Organisasi

- Pengurus Persekutuan Mahasiswa Kristen Oikumene (PMKO) FISIP UNHAS Periode 2018/2019 (Divisi Dana dan Usaha)
- Pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi (HUMANIS) FISIP UNHAS Periode 2018/2019 (Departemen Komunikasi dan Informasi)



Foto Bukti Melakukan Penelitian di Dinas Sosial Kota Makassar

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS SOSIAL Jalan Arief Rahman Hakim No. 50 Makassar 90211 Telp. (0411) - 448313 Fax. (0411) - 448313 Website : www.dinsos.makassar.go.id Email: dinsos@makassar.go.id</p>	
Makassar, 13 Juli 2020		
Nomor : 460/1024/Dinsos/VII/2020	Kepada Yth. Dekan FISIP UNHAS Makassar	
Lampiran : -		
Perihal : <u>Telah Melakukan Penelitian</u>	di-	
	Makassar	
<p>Dengan Hormat,</p> <p>Sehubungan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 070/586-II/BKBP/III/2020, Tanggal 12 Maret 2020, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa:</p>		
Nama :	WINNIE THALIA	
Nim/Jurusan :	E21116007/Adm. Negara	
Pekerjaan :	Mahasiswa (S1) / UNHAS	
Alamat :	Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar	
Judul :	"EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR "	
<p>Telah mengadakan Penelitian pada Instansi/ Wilayah Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan judul di atas, yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret s/d/ 11 Mei 2020.</p>		
	<p style="text-align: center;"> Kepala Seksi Penyuluhan dan Penelitian DINAS SOSIAL <i>[Signature]</i> HARMA S. Sos Pangkat : Penata TK. I NIP. 19680529 199102 2 002</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul-sel di Makassar2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul-Sel di Makassar3. Mahasiswa yang bersangkutan4. Arsip		



Foto Bukti Melakukan Penelitian di Kecamatan Biringkanaya



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN BIRINGKANAYA

Jl. Prof. DR. Ir. SUTAMI Telp. (0411) 4720765, Makassar 90241

SURAT KETERANGAN

No. 070/319/KBRK/VI/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

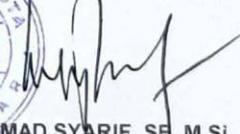
Nama : WINNIE THALIA
NIM / JURUSAN : E21116007/ Adm. Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10. Makassar

Telah melaksanakan penelitian pada :

Tanggal : 12 Maret s/d 11 Mei 2020
Tempat : WILAYAH KECAMATAN BIRINGKANAYA
Judul : " EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN BIRINGKANAYA
MAKASSAR"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Juni 2020

AP. CAMAT BIRINGKANAYA
KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

MUHAMMAD SYARIF, SE., M.Si
NIP. 19780508 201001 1 007



DOKUMENTASI

Foto Halaman Depan Kantor Dinas Sosial Kota Makassar



Gambar 1

Foto Kantor Dinas Sosial Kota Makassar



Gambar 2



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Gambar 3



Peneliti bersama Narasumber
Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) Biringkanaya

Gambar 4



Peneliti bersama Narasumber selaku
perwakilan Bidang Pengendalian Bantuan
dan Jaminan Kesejahteraan Sosial di Dinas
Sosial Kota Makassar

Gambar 5



Peneliti bersama Narasumber selaku pemilik E-Warong di
Kecamatan Biringkanaya



Peneliti bersama Narasumber selaku penerima program BPNT



Gambar 6



Gambar 7



Peneliti bersama Narasumber selaku penerima program BPNT



Gambar 8



Gambar 9



Peneliti bersama Narasumber selaku penerima program BPNT



Gambar 10

Peneliti Bersama Ibu Sekertaris Kelurahan Sudiang



Gambar 11



Optimized using
trial version
www.balesio.com